**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam satu rumah tangga melalui lembaga pernikahan. Proses akad niah dilangsungkan secara sederhna, tapi sakral dan amat besar pengaruhnya. Akad nikah dengan ucapan ijab dan kabul yang nampak sederhana, sesungguhnya sebuah peristiwa yang dahsyat. Sebab melalui akad nikah tersebut akan terjadi perubahan besar. Hubungan laki-laki dan perempuan yang asalnya haram menjadi halal. Hubungan yang semula maksiat menjadi ibadat. Hubungan yang semula dosa menjadi berpahala.

Islam menghendaki agar lembaga pernikahan itu berkembang dengan baik dan benar. Islam lantas mengaturnya secara rinci, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi Muhammad saw. Eksistensi lembaga perkawinan yang sakral seperti itu sekaligus sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik, agar tidak dikotori dengan perilaku-perilaku menyimpang dan perilaku-perilaku yang merusak.

Rasulullah saw telah berwasiat kepada : “Wahai manusia, takutlah kepada Allah (berhati-hatilah) dalam urusan wanita. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka sebagai istri dengan amanah Allah. Kami halalkan kehormatan mereka dengan kalimah Allah. Sesungguhnya kamu punya hak atas istrimu dan istrimu pun mempunyai hak atas kamu. Ketahuilah, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri kalian….” (HR. Muslim)

Islam mengarahkan tujuan pernikahan itu untuk membentuk bangunan rumah tangga yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat. Meskipun Islam tidak menampik adanya kemungkinan terjelek, yaitu gagalnya sebuah rumah tangga ditengah jalan. Disamping itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah menggariskan tentang idealnya sebuah keluarga yang dicita-citakan. Pada Pasal 1 dirumuskan, bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan pasal 1 tersebut terkandung tujuan mulia dilangsungkannya suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang bahagia dan kekal itu kemudian popular dikenal dengan istilah Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, yaitu suatu keluarga yang tenang, tenteram, antara suami dan isteri terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.

Lebih lanjut dapat ditelusuri, bahwa berdasarkan Kepurtusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Eksistensi keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah seperti itu dapat kita posisikan sebagai amanah yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita berkewajiban untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Agar keluarga bisa berdiri tegak sebagai satu bangunan yang kokoh, maka kunci utamanya adalah mendasari bangunan keluarga itu dengan pondasi agama. Keluarga yang berlandaskan agama, akan senantiasa dinafasi dengan akhlak mulia. Suasana rumah tangga yang dinafasi akhlak mulia akan membawa suami istri saling menghargai, suami dan istri saling jujur, tidak ada dusta diantara kita. Anak-anak jujur kepada orang tuanya, demikian sebaliknya, orang tua tampil sebagai figur teladan, sehingga patut menjadi uswah.

Bagi semua pasangan suami istri yang menginginkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah penting untuk selalu memahami makna sebuah perkawinan. Dalam konteks ini ada empat hal penting. Pertama, memahami dan memaknai perkawinan dengan baik. Dalam Islam menikah adalah bagian dari ibadah kepada Allah, bukan sekedar legal-formal yang mengikat jalinan suci. Sebagai sebuah ibadah seharusnya dimulai dan dilandasi dengan niat yang baik. Sehingga orientasi menikah bukan dominan karena fisik, harta, strata sosial dan sebagainya, tapi karena Allah. Alhasil, ketika nikah dengan niat yang baik dan menganggapnya sebagai ibadah, insya Allah akan tertanam sifat sabar, saling menghargai antara suami isteri. Dan yang lebih penting, pasangan suami-isteri menyadari bahwa bahtera rumah tangga menjadi sarana bagi mereka untuk dekat kepada Allah.

Kedua, menikah itu adalah amanah Allah. Ketika berbicara amanah pasti ada bentuk pertanggungjawabnya. Bertanggung jawab kepada pasangan, dan keluarga pasangan. Dan yang lebih penting bertanggungjawab kepada Sang Khalik. Bukankah halalnya pasangan karena persetujuan Allah dengan menggunakan asma-Nya ketika ijab-qabul. Artinya, Allah melihat dan menyaksikan perjanjian perkawinan yang diucapkan. Pasangan yang paham konsep ini, jelas tidak menjadikan perceraian sebagai solusi awal. Tapi memandang perceraian sebagai pintu darurat, ketika tidak terbukanya pintu lain dalam menyelesaikan silang-sengketa dalam rumah tangga. Bukankah Nabi Muhammad mengungkapkan “Bahwa perbuatan yang dibolehkan tapi paling dibenci Allah adalah perceraian”.

Ketiga, menghidupkan agama sebagai sumbu pelita dalam rumah tangga. Selama ini agama tidak hidup dalam rumah tangga, kalaupun hidup cahayanya redup-redup dan mudah padam sekali hembusan. Pasangan yang tidak salat dan tak pernah terdengar lantunan ayat-ayat Al-Qur’an dari bibirnya akan berimplikasi terhadap ketenangan dan keharmonisan rumah tangga. Ibarat membangun sebuah menara tinggi, agar kokoh dan tak mudah rubuh, pondasinya haruslah kuat. Demikian juga membangun rumah tangga. Material penting yang membuat fondasi rumah tangga kuat dan kokoh itu adalah implementasi nilai-nilai agama.

Keempat, memahami relasi suami-isteri. Hubungan suami-isteri adalah hubungan yang setara, bukan saling adu dominasi. Untuk itu menjalin komunikasi, memahami satu sama lainnya menjadi sebuah keniscayaan dalam era sekarang. Artinya menjadi suami bukanlah sekedar tampil dengan label suami sebagai pemimpin, sehingga otoriter dan semaunya. Sebaliknya isteri yang merasa punya penghasilan dan pekerjaan jangan pula ingin merampas “tahta” suami sebagai pemimpin rumah tangga, apalagi menjatuhkan maruah suami sebagai laki-laki. Keduanya harus paham hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri yang acuannya adalah ajaran agama, bukan egoisme, apalagi nilai-nilai yang tak selaras dengan agama. Perbedaan tugas dan tanggungjawab suami isteri itu adalah anugerah Tuhan agar kehidupan itu menjadi Indah. Bukan untuk saling mengingkari, yang akhirnya akan menimbulkan friksi. Tapi perbedaan itu wahana untuk saling berbagi, melengkapi dan berbakti guna mencari ridha Ilahi

Disamping memiliki tugas penting dalam mengawal perkembangan keluarga sakinah, tak kalah pentingnya, penghulu juga memiliki tugas berat dalam menghadapi problematika keluarga masa kini, yang mulai banyak kehilangan kesakralannya. Secara berlahan semakin dirasakan terjadinya desakralisasi lembaga perkawinan di tengah-tengah keluarga muslim.

Jika dicermati dengan seksama, lembaga perkawinan sekarang ini tengah menghadapi tantangan yang berat. Dan jika hal itu dibiarkan berjalan asal-asalan, maka lembaga perkawinan akan bisa terpuruk, karena tidak lagi memiliki kekebalan (tidak imun) lagi.

Halaqoh Munakahat yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beberapa bulan lalu, antara lain menyoroti terjadinya desakralisasi lembaga perkawinan. Salah satu indikatornya muncul kasus perkawinan sejenis yang terjadi di Jember dan terjadinya banyak perceraian.

Sebagai tugas bersama, termasuk tugas para penghulu adalah menjaga imunitas dari perilaku menyimpang. Terjadinya perkawinan sejenis yang belum lama terjadi di Jember, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melegalkan pernikahan sejenis, dapat dipandang sebagai satu bagian dari upaya untuk menyuntikkan virus dalam lembaga perkawinan yang sakral.

Salah satu nara sumber menegaskan, bahwa ada pihak-pihak diluar Islam yang menghendaki agar pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu berjalan bebas, bebas memilih pasangan, yang penting suka sama suka.

Kemudian menjaga imunitas keluarga dari perceraian. Berdasarkan grafik perceraian dari tahun ke tahun, jumlah perceraian terus meningkat. Ini sebuah problem lembaga pernikahan yang cukup berat. Bagaimana tidak, bukankah tujuan pernikahan itu untuk membentuk keluarga yang kekal sampai hayat, ternyata ironis, banyak lembaga perkawinan yang terpuruk di tengah jalan, berakhir dengan perceraian.

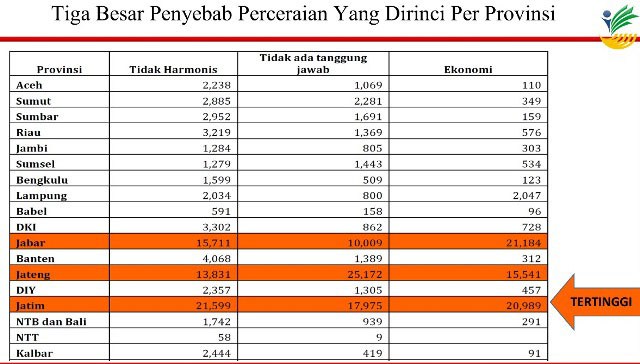
Pada akhir-akhir ini publik menyaksikan bagaimana banyaknya bangunan suci itu tumbang berserakan. Data dari Kementerian Agama, menunjukkan bahwa perceraian terus meningkat di Indonesia. Bahkan menurut Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar sebagaimana ditulis di https://www.merdeka.com. kenaikan angka perceraian sejak tahun 2009 hingga 2016 mencapai 16-20 persen. Hanya pada satu tahun saja angka perceraian sempat turun. Yakni 2011, sebanyak 158.119 ribu perceraian dari 285.184 ribu sidang talak setahun sebelumnya.

Adapun rekor angka perceraian tertinggi dalam setahun terjadi pada 2012. Kala itu palu hakim yang mengesahkan perceraian diketok 372,557 kali. Artinya, terjadi 40 perceraian setiap jam di Indonesia.

Data dari Kemensos RI menunjukkan jumlah perceraian tertinggi ada di Jawa Timur mengungguli Jawa Tengah dan Jawa Barat.

**Tabel 1.A.1**

**Jumlah Perceraian Di Indonesia**



Sumbrer Grafis: Kemensos RI

Tren tersebut tentu saja menjadikan kekhawatiran bagi kita semua, terutama bagi masyarakat Jawa Timur. Sebab hal itu mengindikasikan rapuhnya institusi perkawinan saat ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tiga tahun lalu sudah mengingatkan, angka perceraian di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Pasifik.

Alasannya bercerai pun beragam. Mulai dari alasan ekonomi, ketidakcocokan, perselingkuhan, hingga alasan yang sepele dan ringan. Seperti menemukan sms “mesra” di handphone pasangan, menu masakan yang tidak sedap alias tidak sesuai lagi dengan selera pasangan, dan alasan-alasan lainnya.

Hal serupa juga ditemukan di Kabupaten Lumajang, dimana angka perceraian setiap tahunya cukup tinggi, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum, maupun yang dilakukan oleh kalangan khusus, seperti para PNS dan kalangan guru.

Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik pada beberapa kesempatan menyampaikan dalam sambutannya tentang fenomena banyaknya PNS atau ASN yang rumah tangganya mengalami konflik dan berujung pada perceraian. Diantara PNS dan ASN itu ada yang berlatar belakang guru, dimana secara material mereka sebenarnya makin sejahtera setelah menerima tunjangan dari sertifikasi guru (sergu), akan tetapi ternyata menjadi ujian dalam rumah tangganya. Mereka yang tidak hati-hati, dengan adanya sergu itu justru membawa dampak negatif pada keutuhan rumah tangganya.

Pada era dulu, tantangan perkawinan tidaklah semenantang hari ini. Persoalan yang menjadi  pemicu perceraian lebih banyak disebabkan oleh faktor internal yang benar-benar “mengharuskan” orang untuk melakukan perceraian. Tapi kini, persoalannya menjadi berbeda. Pemicunya beragam. Sehingga pasangan yang menikah harus hati-hati dalam menjalani kehidupannya dan menjaga bangunan suci itu dengan sebaik-baiknya.

Lebih jauh dijelaskan, diantara tantangan perkawinan masa kini adalah menghadapi terjadinya pergeseran nilai dalam bingkai rumah tangga. Nilai-nilai sakral (suci) yang selama ini menyelubungi perkawinan, satu demi satu sudah mulai bergeser, akibat infiltrasi nilai-nilai asing atau yang tidak selaras dengan Islam.

Fenomena yang muncul, sebagian pihak menghendaki hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dilakukan secara bebas seperti layaknya hubungan hewan, muncul kasus perzinaan dimana-mana, gaya hidup perselingkuhan, suburnya bisnis prostitusi, dan lain-lain.

Berbarengan dengan hal itu muncul gaya hidup konsumerisme dan materialisme yang sudah merasuki masyarakat kita. Segala sesuatu seakan diukur dengan materi. Alhasil, mau tidak mau, sadar atau terpaksa ekonomi telah menjadi tantangan berat dalam kehidupan perkawinan era sekarang. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila pasangan tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup dan tidak pandai mengelola keuangan, serta tidak bisa menempatkan skala prioritas dalam memenuhi keperluan hidup.

Dalam keluarga masa kini dapat dirasakan terjadinya perubahan persepsi masyarakat tentang institusi perkawinan. Pergeseran persepsi pasangan suami istri tentang perkawinan sangat berpengaruh besar pada ketahanan keluarga. Ketika jalinan perkawinan itu dirasa tidak lagi memberikan kenyamanan akibat ketidakcocokan dan beragam alasan remeh remeh lainnya dengan mudah mereka melakukan cerai. Pasangan suami-istri juga memandang peristiwa perceraian sebagai hal yang biasa saja, kendati  perjalanan perkawinan itu baru berjalan beberapa bulan atau tahun saja.

Tantangan selanjutnya adalah tentang pekerjaaan. Hari ini, perempuan atau isteri tidak lagi hanya sekadar ibu rumah tangga yang berdiam di rumah saja. Tapi sudah merambah ke dunia kerja dalam berbagai bidang. Artinya, sumber pendapatan keluarga tidak lagi monopoli suami, bahkan ada perempuan yang bergelar isteri mempunyai penghasilan tinggi dibanding suami. Mandirinya isteri secara ekonomi ini, bila tidak diikuti saling memahami dan pengertian akan memunculkan masalah. Seperti berkurangnya perhatian isteri kepada suami, demikian juga sebaliknya. Komunikasi yang terjalin pun adalah komunikasi yang minim kuantitas dan kualitas. Bertemu ketika sudah saling letih dan lelah karena bekerja.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiyah ini dengan judul : “Analisa Faktor-Faktor Dominan Yang Berpengaruh Pada Perilaku Pasangan Suami-Istri Dalam Melakukan Perceraian Di Kabupaten Lumajang”.

**Perumusan Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini berkenaan dengan dua hal pokok, yaitu tentang urgensi eksistensi keluarga sakinah yang tengah menghadapi proses desakralisasi dan factor-faktor dominan yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk desakralisasi Lembaga Perkawinan yang telah terjadi di Kabupaten Lumajang ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Lumajang ?
3. Bagaimana upaya untuk meminimalkan terjadinya perceraian di Kabupaten Lumajang ?
4. **Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penulisan**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dinamika lembaga perkawinan dalam menghadapai berbagai tantangan zaman, khususnya menghadapi desakralisasi dan langkah-langkah Penghulu dalam menghadapi problem dan tantangan tersebut.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Lumajang

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dijalankan untuk meminimalkan terjadinya perceraian di Kabupaten Lumajang

Adapun manfaat penulisan ini secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

* + 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan, khususnya dibidang ilmu munakahat, baik bagi penghulu, bagi institusi/instansi terkait, maupun bagi peneliti sendiri.

* + 1. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi KUA Kecamatan, hasil penelitian ini dapat menambah bahan masukan bagi pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah sampai ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa
2. Bagi Penghulu, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan perkawinan
3. Bagi pasangan suami-istri, hasil penelitian ini dapat menjadi rambu-rambu kehidupan keluarga, agar tidak sampai mengalami nasib buruk berupa perceraian
4. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan, karya tulis ilmiyah yang berjudul “Tantangan Penghulu Dalam Mengahadapi Desakralisasi Lembaga Perkawinan Masa Kini (Study Kasus Tentang Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Lumajang) ini, maka perlu diberi gambaran singkat yang dirumuskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

**BAB II** berisi kajian teoritis yang akan menjadi acuan penelitian, merujuk pada beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian kerangka berfikir dan metodologi penelitian.

**BAB III** berisi tentang pembahasan, yang memaparkan tentang deskripsi masalah, memaparkan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisa masalah dengan pembahasan temuan-temuan.

**BAB IV** penutup, yang berisi tentang beberapa kesimpulan dari hasil penulisan, dan saran-saran untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS DAN METODOLOGI PENELITIAN**

* + - 1. **Kajian Teoritis**

1. **Penelitian Terdahulu**

Kajian teoritis ini diawali dengan kajian beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok bahasan. Hal itu dimaksudkan sebagai sebagai perbandingan dengan apa yang sudah diketahui orang dalam bidang yang akan diteliti, dan bisa dimungkinkan untuk mendalami hal sama dengan pendekatan berbeda.

Beberapa penelitian yang penulis temukan dan memiliki relevansi dengan pokok permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Erna Setyowati (2011), judul penelitiannya Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Pengadilan Agama Ngaw). Penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perceraian Pegawai Negeri Sipil meningkat dan Bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Ngawi Terhadap Fenomena Perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode yang digunakan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, diseleksi dan dianalisis..

Hasil penelitiannya menunjukkan meningkatnya perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau penikahan karena paksaan., perselingkuhan, perzinahan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, suami meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu.

1. Isnawati Rais (2012), judul penelitiannya Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia. Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui fenomena meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun, khususnya cerai gugat, baik di tingkat nasional maupun lokal di Jakarta Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.

1. Nurul Fadhlillah (2013), judul penelitiannya Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang). Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya beberapa faktor penyebab perceraian di Desa Batur, yaitu faktor ekonomi, perselisihan, meninggalkan, gangguan pihak lain atau perselingkuhan, dan perjodohan. Adapun yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di Desa Batur adalah ekonomi dan perselisihan. Keadaan ekonomi yang tergolong menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak lagi dapat terhindarkan.

1. Arlizza Muzayyana (2015), judul penelitiannya Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Badang Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif). Penelitian ini merupakan field research yg menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah berupa wawancara kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai BKD Sleman dan salah satu hakim PA sleman, serta pengumpulan data yang berada di Kantor BKD Sleman.

Penelitian ini untuk mengetahui terjadinya perceraian yang melanda kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman, ditemukan 34 PNS mengajukan cerai pada tahun 2012, dan 31 pada tahun 2013. Melihat jumlah di atas, Kepala BKD Sleman menyatakan bahwa perceraian PNS terjadi peningkatan. Padahal perceraian PNS telah dipersulit dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian PNS di Kabupaten Sleman adalah karena masalah ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran, istri menolak dipoligami, suami menikah sirri, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan hukum Islam. Sehingga alasan tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian sebagai Implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990.

1. Alfan Khaerul Umam (2016), judul penelitiannya Tingginya Angka PerceraianPegawai Negeri Sipil (PNS)Di Kabupaten Ciamis (Study Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyebab perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 dan bagaimana prosedur pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014 yaitu, adanya perselisihan, adanya pihak ketiga, factor ekonomi, tidak adanya keturunan dan meninggalkan rumah. Prosedur permohonan izin perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis telah berjalan sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Dari jumalah 96 pemohon, sebanyak 77 pemohon sudah mendapatkan izin perceraian dan 19 pemohon masih dalam proses.

1. **Desakralisasi**

Istilah “desakralisasi” telah lazim dipakai dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus diartikan dengan “penghilangan kesakralan; proses menghilangnya sifat sakral (suci).” (http://kbbi.co.id/arti-kata/desakralisasi)

Dalam pandangan Islam pernikahan yang dilakukan secara syar’i itu adalah perbuatan suci dan sakral. Dikatakan demikian karena dengan adanya pernikahan itu sepasang kekasih akan menjadi sah dan halal dalam hubungannya untuk melalui bahtera rumahtangga. Menurut Nur Cholis Huda, pernikahan itu adalah sebuah peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang penting. Akad nikah yang dilakuakan meski nampak sederhana tetapi sesungguhnya amat dahsyat pengaruhnya. Itulah sebabnya Allah memberi istilah khusus pada akad nikah ini sebutan “Mitsaqan ghalidha” perjanjian yang berat, perjanjian yang serius. (Nur Cholis Huda, 2008 : 21)

Karena pernikahan itu suci dan sakral, juga merupakan perjanjian yang berat dan serius, maka seharusnya setiap orang menghormatinya dan menjaganya, jangan sampai dinodai dengan perilaku-perilaku yang menyimpang.

Kini, pada sebagian kalangan masyarakat, perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral, sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya perceraian belakangan ini juga ditengarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multi media yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkapkan kasus perceraiannya. (Majalah Perkawinan Keluarga Edisi No. 466/2011 : 15-18).

Dalam rangka menjaga kesucian, Islam memerintahkan untuk menikah dan melarang berzina. Bagi yang sudah beristri, Islam juga membuka peluang untuk beristri lebih dari satu. M. Quraish Shihab ketika menafsirkan Qs. An-Nisa’ : 3 menjelaskan, ayat ini memberi wadah bagi mereka yang menginginkan poligami ketika menghadapi kondisi atau kasus tertenu. Kita tidak boleh menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yangdibenarkan oleh ayat ini dengan syarat tertentu. (M. Quraish Shibah, 2011 : 412)

Sementara zina yang nyata-nyata merupakan perbuatan keji dilarang dalam Islam secara tegas. M. Quraish Shihab menegaskan, zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji yang melampui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Bahkan dalam zina itu terdapat (unsur) pembunuhan. (hal. 80)

Sebagi konsekuensi dari larangan itu, Islam mengatur hukuman bagi para pelaku perzinaan. Mereka yang melakukan zina ghoiru muhshon diancam dengan hukum cambuk 100 kali dan yang berbuat zina muhshon diancam dengan hukum rajam sampai mati.

1. **Perilaku Individu**

Pengertian perilaku telah dirumuskan oleh para ahli. Salah satu diantaranya mendefiniskan perilaku individu sebagai “segala tindakan yang dilakukan dalam pekerjaan maupun diluar pekerjaan manusia.”(Deddy Mulyadi, 2015 : 231)

Contohnya, seperti berbicara, bertukar pendapat, berjalan dan sebagainya. Setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga setiap manusia mempunyai keunikan-keunikan tersendiri. Oleh sebab itu antara individu yang satu dengan yang lain pasti mempunyai perbedaan-perbedaan.

Dalam bahasan ini akan memfokuskan pada perilaku individu suami istri dalam lingkungan keluarga. Termasuk juga perilaku calon suami istri yang akan membangun sebuah rumah tangga.

Perilaku individu berhubungan erat dengan masalah kepribadian. Kepribadian adalah segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk bereaksi dengan orang lain maupun dari lingkungannya, sehingga corak dan kebiasaan itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas pada dirinya.

Sementara kepribadian itu sendiri antara lain dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor gen dan faktor lingkungan. Dipercayaibahwa perilaku seseorang secara murni dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor bawaan (genetika). Faktor genetik atau keturunan merupakan konsepsi dasar atau modal untuk perkembangan perilaku seseorang. Faktor ini akan menurunkan bakat tertentu dan kepribadian tertentu pula.

Dalam konteks ini dapat difahami, jika kepribadian seorang suami disatu sisi dan kepribadian seorang istri pada sisi lain akan sangat mewarnai dinamika rumah tangganya. Oleh karena itu lazim diketahui, kalau mencari calon pasangan hidup harus mencari orang yang memiliki kepribadian yang baik atau memiliki akhlak mulia (akhlakul karima)..

Disamping itu juga dipercai bahwa lingkungan itu berpengaruh untuk pembentukan kepribadian seseorang.Tentang lingkungan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satu pandangan menyatakan, bahwa lingkungan itu ialah segala sesuatu yang ada didalam  atau di luar individu yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku  atau perkembangannya. Lingkungan itu wujudnya dapat berupa benda-benda atau objek-objek alam, orang-orang dan karyanya serta berupa fakta-fakta  objektif dan lain-lain. Hal itu juga sudah lazim diketahui. Pasangan suami istri yang hidup pada lingkungan yang tidak baik, akan bisa menjadikan mereka berperilaku yang tidak baik pula.

Selanjutnya, Deddy Mulyadi menambahkan satu faktor lagi yang membentuk perilaku individu, yaitu faktor situasional. Perilaku seseorang bisa berubah-rubah mengikuti perubahan situasi dan kondisi yang mengelilinginya. (hal. 232)

1. **Tugas Pokok Penghulu**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu pada pasal 1 disebutkan pengertian penghulu sebagai berikut : “Penghulu adalah Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pengertian penghulu itu kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kriditnya pada Ketentuan Umum pasal 1 dan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya pasal 1, yang dimaksud dengan Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Sesuai dengan penjenjangan jabatan penghulu, maka jenjang jabatan penghulu dibagi dalam tiga jenjang jabatan, yaitu Penghulu Pertama, Penghulu Muda dan Penghulu Madya.

Selanjutnya secara umum dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pada pasal 4 tentang Tugas Pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

1. **Program Keluarga Sakinah**

Dua hal penting akan diuraikan dalam bagian ini, yaitu tentang pernikahan atau perkawinan dan tentang keluarga sakinah yang dibentuk dan dibina atas perkawinan yang sah.

Pernikahan secara ethimologi diambil dari kata nikah. Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.

Menurut istilah syara’ “Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat (***mitsaqan ghalidzan***) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan.” (Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 1998 : 396)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan definisi perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Definisi keluarga sakinah sebagaimana dirumuskan dalam buku petunjuk teknis pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.” (hal. 23)

Istilah keluarga sakinah itu merujuk pada ayat Al-Qur’an surat Ar-Rum : 21. Potongan ayat yang berbunyi “***litaskunu ilaiha***” dirumuskan istilah sakinah. Kata sakinah sendiri mengandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. (Yusuf Wibisono, 2017 : 109)

Selanjutnya dijelaskan tentang konsep program gerakan keluarga sakinah. Bahwa keluarga sakinah itu terdiri dari lima macam : Keluarga Pra Sakinah,Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III plus.

**Keluarga Pra Sakinah** yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memehuni kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan.

**Keluarga Sakinah I** yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.

**Keluarga Sakinah II** yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai  keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.

**Keluarga Sakinah III** yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

**Keluarga Sakinah III Plus** yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengambangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. (hal. 23-28)

1. **Alasan-alasan Perceraian**

Perceraian dalam Islam diatur sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah keluarga. Akan tetapi diaturnya perceraian itu sebagai jalan darurat, ketika upaya untuk mempertahankan keluarga gagal dilakukan.

Perceraian atau biasa disebut thalaq berasal dari bahasa Arab ***thalaqa, yuthliqu, thalaqan*** yang mengandung makna ***al-irsal*** atau ***tarku,*** yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, thalaq berarti melepaskan atau membatalkan ikatan perkawinan yang sah. (Yusuf Wibisono, 2017 : 118)

Dalam hukum Islam dikenal dua macam thalaq atau perceraian, yaitu thalaq raj’i dan thalaq ba’in. Dalam tafsir Ayatil Ahkam dijelaskan, thalaq raj’i itu adalah thalaq satu dan thalq dua, dimana suami dapat merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Lebih dari itu, ketika sudah terjadi thalaq tiga, suami sudah tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya. Kecuali jika istri sudah menikah dengan orang lain, menikah yang sah menurut syar’i dengan maksud menikah selamanya, kemudian diceraikan oleh suami kedua itu. (Ali Ash-Shobuni, 2004 : 243)

Sedang untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan-alasan yang cukup, dan memang kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Maka thalaq atau cerai tidak boleh dilakukan untuk main-main.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 disebutkan sejumlah alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan perceraian, yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istr**i**
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian yang dilakukan di Pengadilan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Perceraian yang dijatuhkan suami kepada istri, yang lazim disebut dengan talak
2. Perceraian yang dilakukan istri kepada suami dengan cara mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama. Perceraian seperti ini lazim disebut dengan gugat cerai.

Dalam realitanya, pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama memiliki beragam alasan. Ditulis di https://lifestyle.kompas.com. Dalam mempelajari penyebab perceraian, penelitian sosial memiliki dua cara, yaitu mengamati berbagai pasangan suami istri dan menyimpulkan faktor apa yang membuat mereka bercerai, sedangkan cara kedua adalah melakukan wawancara kepada pasangan yang memilih berpisah.

Ada banyak faktor penyebab perceraian ini. Diantara faktor penyebabnya sebagai berikut :

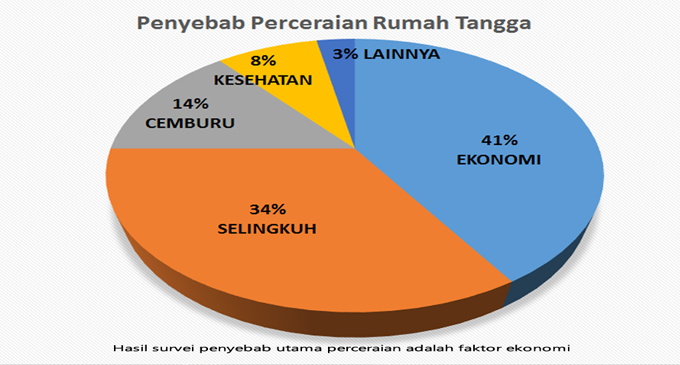
1. Dipicu oleh sebab perselingkuhan. Hal ini sepertinya semakin menggejala pada gaya hidup keluarga akhir-akhir ini. Dengan bahasa lain hubungan lawan jenis terlihat semakin bebas dilakukan.
2. Disebabkan oleh kemalasan. Pernikahan membutuhkan kerja keras dan jika keduanya tidak memiliki komitmen untuk bekerja keras, maka jangan berharap pernikahan akan bertahan lama. Lebih-lebih bagi seorang suami, karena kekuatan rumah tangga bertumpu pada dirinya.
3. Disebabkan oleh kurang bagusnya komunikasi antara suami dan istri. Meskipun nampak sederhana, tapi soal komunikasi suami istri begitu urgen dan sangat menentukan kelangsungan rumah tangga.
4. Ekspetasi yang terlalu tinggi yang berpadu dengan kemalasan. Sungguh tidak wajar, jika ekspetasi tinggi sementara dirinya bermalas-malasan, dari mana ia akan dapat memenuhi kebutuhannya ? Akibatnya, bisa menggoyahkan keluarga.

Data lain dimuat di <https://www.google.com>. menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian antara suami-istri, yaitu :

1. Disebabkan faktor ekonomi
2. Disebabkan terjadinya perselingkuhan
3. Disebabkan adanya kecemburuan
4. Disebabkan faktor kesehatan, dan factor-faktor lainnya.

**Gambar II.A.2**

**Penyebab Perceraian Suami Istri**



1. **Tantangan Keluarga Masa Kini**

Sungguh tidak mudah untuk mewujudkan cita-cita mulia membangun keluarga sakinah di masa kini. Begitu banyak tantangan yang ada didepan kita, yang membutuhkan respon positif, cepat dan menyelesaikan masalah. Tantangan paling berat membangun keluarga sakinah di tengah masyarakat modern adalah adalah dalam menghadapi penyakit manusia modern.

Pada zaman Nabi, tantangan lebih bersifat fisik, tetapi pada zaman modern, musuh justru menyusup ke rumah tangga melalui teknologi komunikasi & informasi. Sering tidak disadari, sebenarnya keluarga kita sudah dikuasai oleh berbagai kekuatan yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan. Penyakit manusia modern terutama adalah apa yang disebut Pisikolog Humanis Rolllo May sebagai Manusia dalam Kerangkeng. Mereka tidak tahu apa yang diinginkan dan tidak mampu memilih jalan hidup yang diinginkan. Mereka mengalami keterasingan dari lingkungan bahkan dari diri sendiri. Mereka juga dikerangkeng oleh tuntutan sosial. Dalam hidupnya mereka berusaha keras melakukan apa yang seakan-akan mereka inginkan, padahal sebenarnya keinginan sosial. Mereka sibuk meladeni keinginan orang lain sampai lupa akan keinginan sendiri. (http://www.tholabulilmi.org)

Lebih jauh diulas di Majalah BAZNAS Lumajang edisi 51 November-Desember 2017, diantara tantangan keluarga sakinah abad sekarang adalah pertama, makin lemah dan memudarnya nilai kesakralan pernikahan. Dengan bahasa lain, terjadi desakralisasi pernikahan. Melalui infiltrasi nilai-nilai budaya asing telah menimbulkan dampak negative bagi kelangsungan keluarga sakinah. (hal. 7)

Kedua, terjadinya pergeseran persepsi pasangan suami istri tentang perkawinan, bahkan ada upaya-upaya pihak luar yang tidak menginginkan tegaknya lembaga pernikahan sesuai ajaran Islam. Mereka menginginkan hubungan laki-laki dan perempuan itu berjalan bebas, hidup layaknya suami istri hanya dengan dasar suka sama suka, atau cocok atau tidak cocok. Bahayanya, jika pasangan suami istri itu sudah merasa tidak cocok, maka dengan mudah mereka akan mengakhiri hubungan perkawinannya. Perceraian dipandang sebagai hal biasa yang tidak tabu lagi.

Ketiga, makin kuatnya gaya hidup konsumerisme dan materialisme. Segala sesuatu diukur secara materi, sedangkan kebutuhan non materi diabaikan. Peran agama sebagai dasar pijakan keluarga menjadi terpinggirkan. Dan tantangan-tantangan lainnya.

* + - 1. **Kerangka Berfikir**

**Gambar II.B.3**

**Kerangka Berfikir**

**Penelitian Terdahulu**

1. Erna Setyowati (2011), tentang Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi)
2. Isnawati Rais (2012), tentang Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia. Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.
3. Nurul Fadhlillah (2013), tentang Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)
4. Arlizza Muzayyana (2015), tentang Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Badang Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)
5. Alfan Khaerul Umam (2016), tentang Tingginya Angka PerceraianPegawai Negeri Sipil (PNS)Di Kabupaten Ciamis (Study Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis)
6. Kkkkk
7. kkkkk

**Konsep & Teori yang relevan**

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Penghulu
2. Program Keluarga Sakinah
3. Alasan-alasan Perceraian
4. Tantangan Keluarga Masa kini

Pembinaan Calon Pengantin.

Kursus Catin.

Pembinaan Hukum Munakahat

Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk

Pembinaan Keluarga Sakinah

Problem Tingginya Angka Perceraian

Di Kabupaten Lumajang

Problem & Tantangan Keluarga Masa Kini

Terjadi Desakralisasi Lembaga Perkawinan

* + - 1. **Metodologi Penelitian**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti bermaksud menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan metode observasi partisipasi, peneliti terlibat dalam kegiatan informan kunci yang menjadi subjek penelitian dan sumber informasi penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu pembahasan yang mendalam tentang obyek penelitian menyangkut individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif tentang obyek penelitian*.* Oleh karena itu, dengan pendekatan kualitatif ini penulis melakukan pengumpulan data secara intensif dan kemudian menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara ilmiyah.

Pada tahap akhir, dari data yang telah dikumpulkan itu selanjutnya diolah dan dianalisa untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1. **Obyek Penelitian**

Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah tentang dinamika keluarga sakinah pada masa kini yang tengah menghadapi berbagai tantangan, diantaranya adalah tantangan desakralisasi. Keluarga yang tidak kokoh pondasinya akan merasakan dampak negatifnya secara langsung, banyak diantara keluarga yang mengalami perceraian.

Selanjutnya, yang menjadi perhatian pada penelitian ini adalah tentang tingginya angka perceraian di Kabupaten Lumajang, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum, maupun yang dilakukan oleh kalangan tertentu, seperti kalangan PNS dan kalangan guru, dengan berbagai alasan dan sejumlah faktor penyebab terjadinya perceraian itu.

**3. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya, data penelitian itu ada dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Dalam penelitian ini digunakan dua-duanya, baik data internal maupun data eksternal.

Data internal adalah data yang diambil dari dalam tempat di lakukannya penelitian. Dalam hal ini data internal digali dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan Pengadilan Agama Lumajang

Adapun data eksternal adalah data yang diambil dari luar tempat di lakukannya penelitian. Data ini diperoleh dari berbagai media, seperti radio, media online dan sebagainya. Juga dapat diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan.

Disamping itu, penelitian ini juga menggunkan data primer dan skunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli perusahaan atau organisasi. Data primer penelitian ini berbasis dokumentasi dan hasil wawancara.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, diperoleh melalui publikasi di berbegai media. Data sekunder juga diperoleh dari study kepustakaan, buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi pokok bahasan.

1. **Tehnik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpiulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, antara lain dengan wawancara, observasi dan data dari dokumentasi :

1. Wawancara (interview*)*, yang merupakan tehnik pengumpulan data dengan proses tanya jawab (dialok) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian, agar data yang diperoleh sesuai atau relevan dengan pembahasan. Dalam hal ini peneliti memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang tidak tertuju pada satu pedoman wawancara atau wawancara yang dilakukan bebas dimana penulis hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

1. Observasi, yang merupakan tehnik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, tanpa adanya komunikasi dengan yang bersangkutan. Observasi dilakukan untuk mengamati dan mengetahui tentang obyek penelitian.
2. Dokumentasi, yang merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang sudah tersedia. Hal ini dilakukan dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, antara lain berupa data-data, arsip-arsip dan gambar-gambar ataupun bentuk lainnya.
3. **Tehnik Analisa Data**

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menggunakan analisis, data-data yang diperoleh dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kualitatif atau analisa non-statistik. Analisa non statistik ini sering disebut dengan analisa isi (content analysis), yang mencakup analisis deskriptif, kritis, komparatif, dan sintesis.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dimana data-data itu diambil dari sumber mamnapun dan dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisa data non-statistik menggunakan data-data yang tidak di-angkakan. Data kualitatif diolah atau dianalisis berdasarkan isinya (subtansinya).

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Deskripsi Masalah Dan Penyajian Data**

Mengawali pembahasan Bab III ini penulis akan menyajikan data peristiwa nikah yang diambil dari Kantor Kementerian Agama Kab. Lumajang tahun 1015-2017. Kemudian menyajikan data peristiwa thalak dan cerai yang diambil dari Pengadilan Agama Kab. Lumajang.

**Tabel III.A.1**

**Jumlah Peristiwa Nikah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah Peristiwa** | **Keterangan** |
| 01. | 2015 | 9.814 peristiwa |  |
| 02. | 2016 | 9.471 peristiwa |  |
| 03. | 2017 | 10.290 peristiwa |  |

**Sumber Data** : Kantor Kementerian Agama Kab. Lumajang

Dari data pernikahan diatas, jika dibuat jumlah rata-rata pernikahan pertahun akan ditemukan angka 9.850 peristiwa lebih.

Selanjutnya jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lumajang dapat dibuat tabel sebagai berikut :

**Tabel III.A.2**

**Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Jumlah Perceraian | Keterangan |
| 01. | 2015 | 2.545 | Dari 10.958 yang diajukan |
| 02. | 2016 | 3.093 | Dari 11.277 yang diajukan |
| 03. | 2017 | 3.102 | Dari 10.667 yang diajukan |

**Sumber Data** : Pengadilan Agama Kab. Lumajang

Berdasarkan data di Pengadilan Agama diatas, jumlah perceraian jika dibuat rata-rata pertahun sebanyak 2.913 peristiwa perceraian.

Membandingkan antara jumlah pernikahan sekitar 9.000 lebih peristiwa per tahun dengan jumlah perceraian sekitar 2.900 sampai 3.000, itu berarti perceraian bisa mencapi kisaran 30 persen dari peristiwa perkawinan.

Diluar data tersebut diatas, jika disingkronkan dengan data-data pendukung lainnya, ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

Jumlah perceraian di Kabupaten Lumajang termasuk tinggi. Mereka yang melakukan perceraian bukan hanya kalangan masyarakat awam, tapi juga dari kalangan yang terpelajar dan sudah mapan.

Para PNS juga banyak yang melakukan perceraian. Data yang diunggah oleh http://lumajangsatu.com menyebutkan, di tahun 2013 banyak PNS yang telah mengajukan perceraian, yang banyak didominasi oleh PNS guru, khusunya Guru SD. Bahkan yang lebih mengagetkan, Pengadilan Agama setiap harinya menerima 1-3 SK ijin cerai dari Pemerintah Daerah bagi para PNS yang akan melakukan perceraian. Data ini dikuatkan oleh data yang disampaikan oleh Badan Penasehatan, Pelestarian dan Pembinaan Perkawina (BP4) Kabupaten Lumajang, yang menyebut banyak PNS yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Hal itu juga singkron dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik. Pada beberapa kesempatan Bupati Lumajang menyampaikan tentang fenomena banyaknya PNS atau ASN yang rumah tangganya mengalami konflik dan berujung pada perceraian. Diantara mereka itu ada yang berlatar belakang guru. Berdasar data di PA Lumajang tahun 2017, PNS yang mengajukan cerai sebagai penggugat/pemohon sebanyak 20 orang, ditambah PNS yang melakukan cerai sebagai tergugat/termohon sebanyak 26 orang.

Banyaknya PNS yang melakukan perceraian bukan hanya terjadi di Kabupaten Lumajang. Berdasar beberapa sumber berita, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Gresik, di Kabupaten Nganjuk, di Kabupaten Blitar, dan (mungkin) di Kabupaten/Kota lainnya.

Berdasarkan data di PA Lumajang, jika dilihat dari faktor penyebab perceraian, yang paling dominan yang melatar belakangi terjadinya perceraian adalah adanya ketidak harmonisan dalam keluraga, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, faktor krisis akhlak (zina, mabuk, judi, madat), factor KDRT, dan faktor kawin paksa.

Khusus menyangkut perceraian PNS, faktor penyebabnya adalah adanya gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan dan faktor tidak adanya keharmonisan antara suami istri, karena terkadang suami dan istri sama-sama bekerja. Atas tingginya tingkat perceraian di kalangan PNS, BP4 berharap, masing-masing kepala dinas melakukan pembinaan keluarga Sakinah bagi PNS secara inten.

Jika dilihat dari faktor usia, rata-rata pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama adalah  pasangan muda, dengan usia suami-istri dibawah 30 tahun. Tujuan perkawinan yang ingin membentuk keluarga bahagia dan kekal itu ternyata banyak yang berantakan di usia yang masih muda.

Data berikutnya, sebagaimana informasi yang dihimpun TEMPO, pada 2014 lalu, Pengadilan Agama Lumajang banyak memberikan dispensasi kepada pasangan muda untuk menikah, lantaran si perempuannya terlanjur hamil dulu sebelum menikah. Ketika hal itu dikonfirmasikan, petugas (staf) di PA Lumajang membenarkan. Bahkan ditambahkan, sebagian diantara mereka yang mendapat dispensasi menikah itu, ketika sudah menikah, umur pernikhannya tidak bertahan lama. (wawancara tanggal 15 Pebruari 2018)

Dari data yang diperoleh dari PA Lumajang juga menunjukkan fakta lain, ternyata perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama lebih banyak cerai gugat dari pada cerai talak. Hal itu menunjukkan makin dominannya posisi perempuan (istri) dibanding laki-laki (suami)

BP4 Kabupaten Lumajang dilibatkan untuk ikut memberikan penasehatan terhadap beberapa pasangan suami istri, khususnya dari kalangan PNS yang terlibat dalam konflik rumah tangga dan berkeinginan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Sebab, khusus PNS memang diwajibkan untuk berkonsultasi dengan BP4. Tidak semua pasangan suami istri yang mau memanfaatkan jasa BP4 untuk menangani masalah rumah tangganya. BP4 di tingkat Kecamatan yang melibatkan Kepala KUA dan Penghulu juga tidak banyak memainkan perannya.

1. **Analisa Masalah**

Dengan merujuk kembali pada tiga rumusan masalah, maka analisa masalah ini akan membahas tentang tiga hal penting, yaitu tentang bentuk-bentuk desakralisasi yang terjadi terhadap lembaga perkawinan, tentang faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di Lumajang, dan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya perceraian di Kabupaten Lumajang.

Sadar atau tidak sadar, desakralisasi lembaga perkawinan itu sudah nyata terjadi, bukan hanya di kota-kota besar secara nasional, tetapi sudah merambah sampai di tengah-tengah kita. Seperti yang menjadi bahasan pada acara Halaqoh Munakahat yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beberapa bulan lalu, antara lain menyoroti terjadinya desakralisasi lembaga perkawinan. Pada kesempatan itu yang disoroti antara lain terjadinya perkawinan sejenis di Kabupaten Jember. Sudah banyak dibahas melalui berbagai forum dan diunggah di berbagai media, ada skenario besar yang menghendaki untuk dapat melegalkan LGBT di Indonesia. Padahal nyata-nyata hal itu akan menghancurkan institusi keluarga.

Di Kabupaten Lumajang belum terjadi kasus seperti itu. Akan tetapi desakralisasi terjadi dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Dalam artian berbagai bentuk perbuatan yang bisa menodai kesakralan lembaga pernikahan sudah terjadi di Lumajang. Dari paparan data diatas, setidaknya ada tiga bentuk perbuatan yang menjadi bagian dari desakralisasi di Lumajang.

1. Makin sering dijumpai pasangan yang menikah dalam kondisi yang sudah tidak suci lagi, karena mempelai perempuannya sudah hamil terlebih dahulu. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang masih dibawah umur, dengan pertimbangan perempuannya sudah hamil terlebih dulu. Peristiwa seperti itu bisa juga menimpa kepada pasangan lainnya yang usia nikahnya sudah memenuhi ketentuan.
2. Terjadinya perceraian dengan faktor penyebab adanya pihak ketiga atau terjadinya perselingkuhan juga berpotensi pada perilaku menyimpang yang dapat menurunkan kesakralan pernikahan, jika hal itu dilakukan dengan cara menerjang aturan syara’ dan hukum perkawinan yang berlaku.

Yang diuraikan pada nomor 1 dan 2 diatas, jika nyata-nyata disitu ada bentuk pelanggaran berupa perzinaan, maka hal itu merupakan bagian dari desakralisasi. Padahal sebagaimana telah dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, bahwa zina itu yang nyata-nyata merupakan perbuatan keji yang dilarang dalam Islam secara tegas. Perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji yang melampui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Dalam zina juga terdapat unsur pembunuhan.

Hanya saja, pada bagian nomor 2, akan lebih aman dan lebih baik jika menempuh poligami secara sah, meskipun hal itu tidaklah mudah, dan menghindari hubungan gelap dalam bentuk perselingkuhan.

1. Proses menikah yang sakral bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dunia akhirat. Dengan mudahnya orang bercerai akan berpotensi menurunkan kesakralan pernikahan. Padahal, meskipun perceraian itu diperbolehkan dalam pandangan Islam, tetapi ditempuh sebagai jalan darurat, dan itupun dibenci oleh Allah.

Sampai pada batas ini, peran penghulu lebih menonjol pada pembinaan perkawinan pra nikah atau pada kegiatan kursus calon pengantin. Sementara pada mereka yang sudah berkeluarga, tetapi terlibat dalam kasus perselingkuhan, peran penghulu kurang dapat berfungsi dengan optimal.

Dilihat dari sudut perilaku individu, tingginya angka perceraian itu menunjukkan adanya makin dominannya pengaruh buruk lingkungan terhadap perilaku suami istri, sehingga banyak terjadi kasus-kasus perzinaan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh calon pengantin dan atau pasangan suami istri.

Tentang kenyataan seperti ini, tidaklah mungkin penghulu akan berdiri sendiri di pintu depan untuk menghadapi tantangan desakralisasi lembaga perkawinan.Harus dihadapi secara gandeng renteng, melibatkan banyak pihak yang terkait. Peran orang tua dalam lingkungan keluarga sangat menentukan efektif tidaknya kontrol terhadap pergaulan anak-anaknya, jangan sampai anak-anak dibiarkan bebas bergaul, atau salah pergaulan.

Kemudian secara kelembagaan, sependapat dengan anjuran BP4 terkait dengan perilaku individu PNS yang melakukan perceraian. BP4 menganjurkan, agar masing-masing kepala dinas melakukan pembinaan keluarga Sakinah bagi PNS. Dengan pembinaan yang intens diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di kalangan PNS.

Satu lagi yang amat penting dan prinsip, yaitu menyangkut penegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan perselingkuhan, perzinaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini hukum positif Indonesia masih sangat-sangat lemah jika dibandingkan dengan hukum Islam. Karena kondisinya seperti itu, maka tidak memberi efek jera terhadap para pelaku, sehingga mereka cenderung berbuat bebas, sesuai keinginan pikiran dan dorongan syahwatnya.

Tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, sudah seharusnya dalam memutus terjadinya perkawinan harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Hakim harus mendasarkan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 yang menentukan sejumlah alasan untuk dijadikan dasar dalam melakukan perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istr**i**
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan data penelitian yang dihimpun, sudah dapat diketahui alasan-alasan apa yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, yaitu adanya ketidak harmonisan dalam keluraga, kemudian faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor kawin paksa, juga karena faktor krisis akhlak. Khusus menyangkut perceraian PNS, faktor penyebabnya adalah adanya gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan dan faktor tidak adanya keharmonisan antara suami istri, karena terkadang suami dan istri sama-sama bekerja

Jika dianalisa, faktor-faktor penyebab perceraian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, terutama yang tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Alasan yang sedikit beda adalah karena adanya kawin paksa.

Hal lain yang menimbulkan perbedaan pandangan adalah tentang mudahnya pasangan suami istri melakukan perceraian di Pengadilan Agama Lumajang. Padahal jika merujuk pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mestinya perceraian itu dipersukar, tidak dimudahkan. Lebih-lebih jika memperhatikan faktor usia, perceraian itu didominasi oleh pasangan mudah dengan usia rata-rata 30 tahun ke bawah. Bagaimana masa depan mereka pasca bercerai ? Sungguh banyak dampak negatifnya dibanding positifnya dari perceraian tersebut.

Tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya perceraian di Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini perlu dilakukan dengan berbagi upaya yang saling menguatkan. Dimulai dari internal keluarga sendiri. Perlu ada langkah-langkah kongkrit untuk melakukan penguatan lembaga perkawinan. Hal itu dipandang sebagai langkah penting dan mendesak, sama mendesaknya dengan penanggulangan bencana moral dan pergaulan bebas yang kini banyak melanda para remaja kita. Tantangan yang makin kompleks hanya mampu dihadapi dengan adanya lembaga perkawinan yang kuat.

Untuk mempersiapkan pasangan suami istri yang kuat menjaga amanah dan tidak mudah goyah dengan berbagai ujian dalam rumah tangga, maka para calon penganten sebelum memasuki pintu rumah tangga harus gembleng mentalnya dan dicerahkan wawasannya. Dalam konteks ini, pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah, seperti kursus calon pengantin (kursus catin) atau bentuk-bentuk lain yang sejenis dengan itu adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan kepada setiap calon pengantin, dan sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perka winan dan mengurangi perceraian.

Yang berjalan selama ini, kursus catin sifatnya masih longgar belum menjadi kewajiban. Ada pandangan, akan menjadi efektif jika Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan nikah secara eksplisit memuat ketentuan mengenai kewajiban mengikuti kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga bagi calon pengantin.

Ketika sudah masuk dalam rumah tangga, setiap pasangan akan menjumpai romantika keluarganya masing-masing. Dibutuhkan sikap dewasa dari masing-masing pasangan. Banyak tips yang diberikan oleh para pakar kepada pasangan suami istri untuk menjaga keuntuhan keluarga sakinah. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Kebutuhan lahir seperti finansial, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Kebutuhan batin dengan cara melakukan hubungan suami istri dengan cara yang makruf. Hindari kekerasan dalam rumah tangga.
2. Suami istri hendaknya melakukan komunikasi yang positif dan aktif. Sebab seringkali terjadi komuniukasi yang pasif antara suami istri menyebabkan kegoncangan keluarga. Disamping itu juga diimbangi dengan sikap yang terbuka.
3. Suami istri harus bisa mengatur waktu. Luangkan waktu untuk memberi perhatian kepada pasangan dan keluarga. Jangan biarkan kesibukan bekerja menjadi jurang yang memisahkan. Jangan biarkan perkawinan anda layu termakan oleh waktu.
4. Suami istri harus menyadari atas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada pasangan yang sempurna. Oleh karena itu masing-masing harus mau melakukan instropeksi diri. Selanjutnya, antara suami istri harus saling memaafkan. Dengan cara seperti itu dapat menutup pintu terjadinya pertengkaran dan konflik keluarga
5. Bersikap qanaah atas pasangannya. Jika ada bibit-bibit yang bisa memumbuhkan perselingkuhan harus segera dihindari. Jangan dibiarkan berlarut-larut yang bisa menjurus kepada perzinaan. Suami istri yang melakukan perselingkuhan berarti telah menghiyanati pernikahannya. (http://www.pelangiblog.com)

Diluar hal itu semua, dalam realita ditemukian banyak kasus perceraian yang terjadi, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah revitalisasi peran BP4 untuk bertindak sebagai mediasi dalam penyelesaian kasus  perceraian diluar peradilan atau out of court settlement. Jika selama ini BP4 belum berperan dan atau belum diperankan dengan baik, seyogyanya ditata kembali, sehingga peran BP4 dapat lebih optimal lagi. Khusus menyangkut PNS, BP4 dapat melakukan kerjasama lintas sektoral dengan kepala Dinas/Instansi, agar dapat ikut meredam maraknya perceraian di kalangan pegawai negeri. Pada level bawah, di KUA-KUA Kecamatan, Penghulu dengan pihak-pihak terkait lainnya dapat mengambil peran aktif dalam gerakan keluarga sakinah yang tahan uji, tidak mudah bercerai.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam karya tulis ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Desakralisasi lembaga perkawinan telah terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai bentuknya. Lembaga perkawinan yang sakral telah ternoda oleh perbuatan-perbuatan dosa, seperti perzinan dan perselingkuhan. Lembaga perkawinan mulai dipandang tidak sakral lagi, sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Akibatnya, jumlah perceraian tinggi. Secara nasional perceraian di Jawa Timur menempati peringkat tertinggi, termasuk didalamnya jumlah perceraian yang terjadi di Lumajang.
2. Banyak faktor penyebab perceraian di Kabupaten Lumajang. Dilihat dari faktor yang paling dominan, yang melatar belakangi terjadinya perceraian adalah adanya ketidak harmonisan dalam keluraga, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, faktor krisis akhlak (berzina, mabuk, judi, madat), faktor KDRT, dan faktor kawin paksa. Khusus menyangkut perceraian yang dilakukan oleh PNS, faktor dominannya adalah adanya gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan dan juga faktor tidak adanya keharmonisan antara suami istri, karena terkadang suami dan istri sama-sama bekerja, sehingga urusan keluarga menjadi korban.
3. Upaya-upaya untuk meminimalkan jumlah perceraian di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan beberapa langkah terpadu. Dimulai dari awal sebelum masuk dalam rumah tangga, para pasangan digembleng dulu mentalnya dan dicerahkan wawasan berpikirnya, melalui kursus catin atau sejenisnya. Kemudian, setelah memasuki rumah tangga, setiap pasangan akan menjumpai romantika keluarganya yang berbeda satu dengan lainnya. Setiap pasangan suami istri dapat menjaga keuntuhan rumah tangganya dengan menerapkan berbagai tips yang sesuai dengan kondisi rumah tangganya. Jika terjadi konflik rumah tangga, maka pasangan suami istri bisa menfungsikan BP4 untuk mencari solusi dan meredam terjadinya perceraian. Kepala KUA dan Penghulu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam layanan perkawinan secara prima dan professional.
4. **Saran-Saran**

Relevan dengan hasil penelituian dan pembahasan, maka perlu disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah diharapkan bisa melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka membentengi keluarga dari bahaya desakralisasi lembaga perkawinan. Lebih khusus lagi membentengi keluarga dari ancaman perzinaan dan bahaya gerakan LGBT.
2. Kepada Kepaka KUA dan Penghulu untuk proaktif dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin melalui berbagai cara yang telah diprogramkan, agar pembentukan keluarga melalui proses pernikahan dapat mewujudkan keluarga sakinah dan memiliki ketahanan dari perceraian.
3. Kepada para calon pengantin dan pasangan suami istri hendaknya menyadari dan mau menghormati kesucian pernikahan. Mereka juga diharapkan dapat menjaga amanah keluarga hingga akhir hayatnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali Ash-Shobuni, Muhammad, 2004,`Tafsir Ayatil Ahkam, Darul Qur’an, Bairut

Cholis Huda, Nur 2008, Mesra Sampai akhir hayat, UMM, Malang

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dep. Agama RI, 2008, Pedoman Penghulu, Jakarta

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dep. Agama RI, 2003, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Jakarta

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2007, Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan, Surabaya

Muhammad Uwaidah, Kamil, 1998, Fiqh Wanita, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta

Quraish Shihab, M. 2011, Tafsir Al-Mishbah, Lentera Hati, Jakarta

Wibisono, Yusuf, 2017, Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi, STIE Widya Gama, Lumajang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kriditnya

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya

Majalah BAZNAS Lumajang edisi 51 November-Desember 2017

Majalah Perkawinan Keluarga Edisi No. 466/2011

<http://www.lumajangtimes.com/baca/107863/20151119/001719/bidan-dan-guru-dominasi-perceraian-pns-kabupaten-blitar/> Diakses tgl. 14 Peb. 2018

<https://koranmemo.com/guru-perempuan-dominasi-pengajuan-cerai/> Diakses tgl. 14 Peb. 2018

http://beritajatim.com/pendidikan\_kesehatan/272303/banyak\_pns\_gresik\_yang\_cerai,\_bidan\_juga\_sama.html?fb\_comment\_id. Diakses tgl. 14 Peb. 2018

<http://lumajangsatu.com/baca/pns-guru-dominasi-perceraian-di-pengadilan-agama-lumajang>. Diakses tgl. 14 Peb. 2018

<https://www.memo-x.com/138401/perceraian-di-kabupaten-lumajang-terus-meningkat.html#.WqnPr7OYPMw>. Diakses Tgl. 28 Pebruari 2018

https://nasional.tempo.co/read/668350/dari-10-000-pernikahan-di-lumajang-seperempatnya-menikah-dini. Diakses Tgl. 28 Pebruari 2018

https://www.barometerjatim.com/paradoks-jatim-perceraian-tertinggi-kebahagiaan-teratas. Diakses Tgl. 28 Pebruari 2018

https://www.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html Diakses Tgl. 28 Pebruari 2018

http://www.tholabulilmi.org/2016/02/kajian-al-quran-online-grup\_17.html Diakses Tgl. 28 Pebruari 2018

http://www.pelangiblog.com/2014/12/13-tips-menghindari-dan-mencegah.html. Diakses Tgl. 28 Pebruari 2018

**BIODATA PENULIS**

**Yusuf Wibisono Bin Abu Darda’**. Lahir di Paciran Lamongan pada 11 Juli 1965. Jenjang pendidikan dimulai dari bangku Madrasah, mulai MI, MTs dan MA. Setelah itu menempuh S.1 di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 1989. Untuk menambah khazanah ilmu hukum, lalu melanjutkan study hukum di STIH Jendral Sudirman Lumajang, lulus tahun 2005. Pendidikan Pasca Sarjana ditempuh di Universitas Jember (Unej) lulus 2009.

Mengawali jenjang karir sebagai PNS di Kantor Departemen Agama Kabupaten Lumajang tahun 1991. Mendapat tugas tambahan menjadi Sekreatris BAZNAS Kabupaten Lumajang mulai tahun akhir 2006 hingga 2015 dan Pimpinan Redaksi Majalah BAZNAS hingga sekarang. Jabatan terakhir sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukodono.

Aktifitas lain diluar kedinasan, ikut terjun pada kegiatan-kegiatan ta’lim dan dakwah pencerahan. Juga menggeluti dunia karya tulis, baik di majalah, tabloid dan buku bacaan ringan. Pernah ikut mengelola Majalah Khazanah, Majalah Mahameru, dan sekarang mengelola Majalah BAZNAS.

Baik secara pribadi maupun bersama teman-teman, pernah membuat beberapa buku, antara lain *Percikan Pemikiran Ringan, Mozaik Keluarga Lumajang, The Power of Zakat, Berbagi Zakat Dengan Sentuhan Cinta, Jangan Tunda Zakat Anda dan Berebut Kapling Di Surga.*

Membangun keluarga sakinah dengan istri tercinta, Rose Rahmawaty. Dikaruniai tiga anak, Muhammad Mufti Fajar, Sakinah Salsabila dan Putri Zakiyah Rahmani. Semoga Allah menjadikan mereka sebagai *zaujah shalihah* dan *dzurriyah thoyyibah.* Amin.